

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2007, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta
- Adi, Priyo Hari. 2006, “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)”, Simposium Akuntansi, Tesis, Padang.
- Abidin, Said, 2012, Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Salemba Humanika, Jakarta
- Asteria, Beta, 2015, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, Tesis, Jawa Tengah
- Bati. 2009. “Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Bojanic, Antonio, The Composition of Government Expenditures and Economic Growth in Bolivia, Vol.50, No 1, p. 83-105
- Clavel, James, 2002, The Art of War. Cetakan Pertama, Ikon Teralitera, Yogyakarta.
- Darma, Nazifi Abdullahi, 2014, Federal capital Expenditure and its impact on Economic Growth, Vol. 4, No. 4, p. 2225-0565
- Erlina. Sri. Mulyadi, 2007, Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Hoadley, Mason, 2006, Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hediyanto, Lino, 2014, Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Bandung Periode 2008-2012, Vol.1, No.3, p.2355-9357
- Kunoro, Mudrajat, 2012, Perencanaan Daerah, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Maharani, Kurnia dan Isnowati, Sri, 2014, Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, Vol. 21, No 1, p.1512-3126
- Mahmudi, 2009, Manajemen Keuangan Daerah, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Cetakan Pertama, YKPN, Jogjakarta.
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan Edisi Revisi Tahun, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta

- Muliana, 2009, “Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Mulyanto, 2007, Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi, Cetakan Pertama, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta
- Nkeckwu, Gabriel, 2013, Capital Expenditure at Dissaggregated level and Economic Growth in Nigeria, Vol. 4, No. 6, p. 2319-7064
- Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala, 2008, Teori Ekonomi Makro. Edisi Keempat, UI, Jakarta
- Rahmawati, Luluk, 2015, Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah, Vol. 4, No. 9
- Sambow, Daniel, 2016, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Kota Manado, Vol. 16, No. 4, p. 2355-9357
- Sarundajang, 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Cetakan Keempat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Siregar, Doli, 2004, Manajemen Aset, Cetakan Pertama, Cerakan Pertama, PT Kresna Prima Persada, Jakarta.
- Soejito, Irawan, 1989, Teknik Membuat Peraturan Daerah. Cetakan Kedua, Jakarta.
- Suaedi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro, 2010, Revitalisasi Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Subagiyo, Aris dan Wijayanti, 2017, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Cetakan Pertama, UB Press, Malang.
- Supranto, Johanes, 2010, Pemasaran Sektor Publik & Organisasi Nirlaba, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Syaukani, 2003, Otonomi Daerah, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2006, Hukum Keuangan Negara, Cetakan Pertama, PT. Grasindo, Jakarta
- Wibawa, Samodra, 2005, Reformasi Administrasi, Gava Media, Yogyakarta
- Yusuf, 2011, Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Youlli, Chrisman. 2012. Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara

UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
2. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
7. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
8. Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Undang Undang 1945 Pasal 18, 18A, 18B tentang Pemerintah Daerah